Research Review
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 4, No. 1, Juli 2025 ISSN: 29622743

Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya

(The Role of Community Participation in the Implementation of Infrastructure Development in Dembe Jaya Village)

Monika Sokoy[1], Yanti Aneta[2], Yacob Noho Nani[3]
[1,2,3]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
monikasokoy401@gmail.com[1], yanti_aneta@yahoo.co.id[2] , yacobnani@ung.ac.id[3]

Article Info

Article history:

Received: 23 Juni 2025
Revised: 21 Juli 2025
Accepted: 22 Juli 2025

Keywords:

Community Participation
Infrastructure Development
Dembe Jaya Subdistrict

Kata Kunci:
Partisipasi Masyarakat
Pembangunan Infrastruktur
Kelurahan Dembe Jaya

Abstract

This study aims to determine the role of community participation in the implementation of infrastructure development in Dembe Jaya Village and the factors that influence it. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of village officials and the community of Dembe Jaya Village. The results of the study indicate that community participation in infrastructure development in Dembe Jaya Village is reflected in four aspects, namely: (1) providing responses to development information; (2) involvement in planning through the Musrenbang forum; (3) participation in the implementation of physical and non-physical projects, although still dominated by certain groups; and (4) participation in utilizing and maintaining development results such as paving block roads and water channels. However, participation is not evenly distributed and is influenced by various factors. Factors that influence the level of community participation consist of internal factors such as awareness and level of understanding of residents, as well as external factors such as social conditions, mutual cooperation culture, economic limitations, and lack of effective public communication. Some residents are only active if there are incentives, and the involvement of certain groups such as immigrant communities is still relatively low. Therefore, a more inclusive, transparent and adaptive approach is needed to increase sustainable participation in development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat kelurahan dan masyarakat Kelurahan Dembe Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya tercermin melalui empat aspek, yaitu: (1) pemberian tanggapan terhadap informasi pembangunan; (2) keterlibatan dalam perencanaan melalui forum Musrenbang; (3) keikutsertaan dalam pelaksanaan proyek secara fisik dan non-fisik, meskipun masih didominasi oleh kelompok tertentu; dan (4) peran serta dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan seperti jalan paving blok dan saluran air. Namun, partisipasi belum merata dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terdiri atas faktor internal seperti kesadaran dan tingkat pemahaman warga, serta faktor eksternal seperti kondisi sosial, budaya gotong royong, keterbatasan

ekonomi, dan kurangnya komunikasi publik yang efektif. Sebagian warga hanya aktif jika terdapat insentif, dan keterlibatan kelompok tertentu seperti masyarakat pendatang masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif untuk meningkatkan partisipasi yang berkelanjutan dalam pembangunan.

Corresponding Author:

Monika Sokoy
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo
Monikasokoy401@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kota Gorontalo merupakan salah satu kota tertua di Pulau Sulawesi yang mengalami perkembangan pesat, terutama setelah menjadi ibu kota Provinsi Gorontalo. Pertumbuhan wilayah ini rata-rata mencapai lebih dari 2% per tahun. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan, termasuk dalam sektor infrastruktur. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat kemajuan suatu wilayah (Sigalingging & Warjio, 2014; Banteng, 2015). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam undang-undang tersebut, terutama pada Pasal 354, ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain penyediaan informasi publik, penguatan kelompok sosial, keterlibatan dalam musyawarah, dan proses pengambilan keputusan.

Tabel 1. Capaian Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan insfrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya (Pemerintah Kelurahan Dembe Jaya, 2024)

No	Kegiatan Pembangunan	Tahun	Target	Capaian Partisipasi	Capaian Pembangunan
1	Pembuatan saluran air	2022	100%	50%	70%
		2023	100%	50%	80%
		2024	100%	50%	90%
2	Pembangunan Jalan Paving Blok	2022	100%	50%	70%
		2023	100%	50%	80%
		2024	100%	50%	90%

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat berperan penting dalam memastikan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Di Kelurahan Dembe Jaya, pembangunan infrastruktur seperti saluran air dan jalan paving blok menjadi prioritas utama. Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, tingkat partisipasi masyarakat dalam dua kegiatan tersebut hanya mencapai 50% dari target 100%. Meskipun begitu, capaian fisik pembangunan meningkat dari 70% menjadi 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tetap berjalan, kemungkinan besar karena faktor dukungan pemerintah, efektivitas pelaksana proyek, dan ketersediaan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurut Tangkilisan (2005), mencakup empat aspek utama, yaitu tanggapan terhadap program, keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan hasil pembangunan. Di Kelurahan Dembe Jaya, masyarakat telah berpartisipasi melalui forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT/RW hingga kecamatan. Namun, keterlibatan aktif masih rendah karena berbagai kendala, seperti kurangnya informasi, minimnya kesadaran, serta hambatan ekonomi. Beberapa warga menganggap aspirasi mereka tidak berdampak signifikan terhadap keputusan pembangunan.

Dalam tahap pelaksanaan, sebagian masyarakat terlibat secara langsung, baik dalam bentuk tenaga kerja, dukungan logistik, maupun kehadiran fisik di lokasi pembangunan. Budaya gotong royong masih terlihat meskipun belum merata. Ada pula kecenderungan sebagian warga hanya mau terlibat jika mendapat imbalan, yang menandakan lemahnya rasa kepemilikan terhadap proyek pembangunan. Kesenjangan

informasi juga menjadi persoalan serius karena tidak semua masyarakat mengetahui proyek-proyek yang sedang berlangsung, yang menandakan lemahnya sistem komunikasi antara pemerintah kelurahan dan warga.

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan menunjukkan hasil yang lebih positif (Kogoya et al., 2015; Tumbel, 2017; Zubaidah et al., 2024). Warga Kelurahan Dembe Jaya merasakan manfaat nyata dari infrastruktur yang telah dibangun, terutama dalam hal kenyamanan dan efisiensi aktivitas sehari-hari. Mereka juga menunjukkan kesadaran dalam menjaga fasilitas umum yang telah dibangun. Namun, masalah seperti konflik lahan masih muncul meskipun dapat diatasi dengan pendekatan kekeluargaan. Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dan menyeluruh (Gwijangge et al., 2022; Wulandari et al., 2025). Prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, harus diterapkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Nurliana, 2023; Sinaga, 2024). Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kelurahan Dembe Jaya, maka penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur agar dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Adji, 2024), yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya, Kota Gorontalo. Pendekatan deskriptif digunakan karena memungkinkan peneliti mengkaji peristiwa sebagaimana adanya di lapangan, tanpa memanipulasi variabel yang diteliti (Nasir et al., 2023). Penelitian kualitatif memberikan ruang bagi eksplorasi makna, pengalaman, dan pandangan masyarakat terkait partisipasi dalam pembangunan, sehingga mampu menghasilkan data yang kaya, kontekstual, dan mendalam (Hasan et al., 2025).

2.1 Lokasi dan Pemilihan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Dembe Jaya, Kota Gorontalo, dengan alasan lokasi ini memiliki relevansi langsung terhadap isu partisipasi masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, kedekatan akses peneliti dengan masyarakat dan aparat kelurahan mendukung kelancaran proses pengumpulan data, terutama dalam menjalin komunikasi dan membangun hubungan kepercayaan dengan para informan. Informan penelitian dipilih secara purposive (bertujuan), yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat pemerintah kelurahan.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

- Observasi partisipatif dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat atau pembangunan, sekaligus mengamati interaksi dan proses partisipasi yang terjadi. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang otentik dan memahami konteks sosial secara nyata.
- Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat kelurahan. Wawancara bertujuan menggali informasi terkait persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka untuk memungkinkan penggalian informasi yang lebih luas dan mendalam.
- Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi, seperti laporan kegiatan pembangunan, perencanaan proyek, notulen musyawarah, serta data administratif lainnya. Dokumen ini digunakan sebagai pelengkap sekaligus pembanding data dari observasi dan wawancara.

2.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat dan aparat kelurahan sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan infrastruktur. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, arsip perencanaan, laporan kegiatan, serta berbagai catatan administratif yang relevan. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan valid mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan.

2.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

- Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyaring data yang relevan, menyederhanakan informasi, serta mengelompokkan temuan sesuai dengan fokus penelitian.
- Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk deskriptif naratif, yang memudahkan peneliti dalam memahami dan menjelaskan hubungan antardata serta fenomena yang diteliti.

- Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian, dengan selalu merujuk pada teori dan temuan lapangan. Kesimpulan yang diambil terus diuji validitasnya sampai diperoleh hasil yang dianggap sahih.

2.5 Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan dan kepercayaan terhadap data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

- Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, baik masyarakat maupun aparat kelurahan.
- Triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- Triangulasi waktu diterapkan dengan melakukan pengumpulan data di waktu yang berbeda, guna memastikan konsistensi dan ketepatan informasi.

Penggunaan triangulasi ini bertujuan agar hasil penelitian memiliki validitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari memberikan tanggapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Namun, partisipasi tersebut belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi beberapa kendala struktural, sosial, dan komunikatif.

Pertama, dalam hal memberikan tanggapan, masyarakat menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya pembangunan. Partisipasi dalam forum seperti Musrenbang dan rapat RT/RW menjadi sarana utama bagi warga untuk menyampaikan pendapat. Namun, kenyataannya tidak semua masyarakat mengetahui atau mengikuti forum-forum ini. Hambatan utama adalah kurangnya informasi yang merata serta distribusi undangan atau pemberitahuan yang belum maksimal. Pemerintah kelurahan pada dasarnya terbuka terhadap masukan masyarakat, namun keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk menetapkan skala prioritas membuat tidak semua usulan dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem komunikasi dan transparansi agar seluruh masyarakat dapat terlibat secara aktif.

Kedua, dalam perencanaan pembangunan, proses Musrenbang dinilai sebagai mekanisme formal yang telah cukup berjalan. Aspirasi masyarakat dihimpun dari tingkat bawah (RT/RW) dan disaring sesuai kebutuhan serta anggaran. Namun, tingkat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keputusan pembangunan masih diperdebatkan. Pihak kelurahan menilai usulan masyarakat cukup menentukan arah pembangunan, tetapi masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka belum cukup berdampak. Faktor yang memengaruhi partisipasi dalam perencanaan meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Kurangnya waktu akibat beban pekerjaan, lemahnya rasa memiliki, serta minimnya komunikasi sejak awal menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan strategi komunikasi yang lebih terbuka.

Ketiga, pada tahap pelaksanaan pembangunan, masyarakat berperan dengan memberikan tenaga kerja dan dukungan logistik, seperti konsumsi. Ini mencerminkan bahwa nilai gotong royong masih ada, meskipun hanya sebagian kecil warga yang aktif berpartisipasi. Mayoritas masyarakat kurang terlibat secara langsung, antara lain karena kurangnya informasi atau tidak dilibatkan secara eksplisit. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi menjadikan masyarakat lebih pragmatis dan cenderung mengharapkan kompensasi atas partisipasi mereka. Untuk ke depan, perlu disusun strategi partisipatif yang menggabungkan insentif dengan pelibatan aktif masyarakat guna menjaga semangat kolektivitas.

Keempat, dalam tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan, masyarakat merasakan manfaat nyata dari infrastruktur yang dibangun, seperti peningkatan kualitas sanitasi dari pembangunan saluran air serta kemudahan mobilitas berkat perbaikan jalan. Lebih jauh, masyarakat juga menunjukkan sikap positif dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan, menandakan adanya rasa memiliki terhadap fasilitas publik. Namun, kendala masih muncul dalam bentuk konflik sosial, terutama terkait penggunaan lahan yang terkadang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pengelolaan konflik melalui pendekatan dialog dan musyawarah menjadi penting agar hasil pembangunan dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Dembe Jaya telah berjalan di semua tahap pembangunan, namun masih perlu diperkuat. Masih terdapat kesenjangan antara kelompok masyarakat yang aktif dan yang pasif, serta tantangan dalam penyebaran informasi, pelibatan menyeluruh, dan pengelolaan harapan warga. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif, perlu dilakukan penguatan kapasitas masyarakat, perbaikan sistem komunikasi, peningkatan transparansi, serta pendekatan yang mampu menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan yang dilakukan.

3.1 Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Menurut Tangkilisan (2005), partisipasi dapat diamati melalui beberapa bentuk, seperti tanggapan terhadap informasi, keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan hasil pembangunan.

Pertama, partisipasi dalam memberi tanggapan mencerminkan peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat terkait Musrenbang. Di Kelurahan Dembe Jaya, masyarakat telah memberikan usulan, namun tidak semua dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan skala prioritas. Meskipun komunikasi dua arah cukup baik, transparansi proses penentuan prioritas masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak merasa hanya sebagai pendengar pasif. Kedua, partisipasi dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui forum Musrenbang berjenjang. Walaupun forum telah disediakan, tidak semua masyarakat aktif terlibat. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran, komunikasi yang terbatas, serta kendala ekonomi yang membuat warga sulit meluangkan waktu. Artinya, partisipasi belum merata meskipun ada mekanisme formal.

Ketiga, partisipasi dalam operasional pembangunan ditunjukkan melalui kerja bakti, sumbangan material, dan kehadiran warga saat pelaksanaan. Meskipun budaya gotong royong masih ada, sebagian warga hanya bersedia terlibat jika ada imbalan. Ketidaktahuan sebagian warga terhadap kegiatan pembangunan menunjukkan lemahnya sistem komunikasi. Keempat, partisipasi dalam menerima dan memelihara pembangunan tampak dari upaya masyarakat menjaga fasilitas seperti jalan paving dan saluran air. Rasa memiliki mulai tumbuh, namun konflik kecil terkait lahan menunjukkan perlunya pendekatan sosial dan komunikasi yang lebih intensif untuk optimalisasi pemanfaatan hasil pembangunan.

3.2 Faktor-Faktor yang menentukan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang utama adalah kesadaran masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Slamet (2003) yang menyatakan bahwa partisipasi akan muncul apabila ada kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Di lapangan, warga yang memahami manfaat pembangunan cenderung lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan. Sebaliknya, warga yang tidak mengikuti forum-forum musyawarah hanya menilai pembangunan dari sisi hasil fisiknya, tanpa memahami tujuan dan manfaat jangka panjang yang ingin dicapai.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memainkan peran penting. Faktor sosial, seperti hubungan sosial, solidaritas, dan peran tokoh masyarakat, menjadi kunci dalam memperkuat partisipasi. Pemerintah kelurahan yang aktif melakukan sosialisasi terbukti mampu mempererat kolaborasi sosial yang menunjang kelancaran pembangunan. Selain itu, faktor budaya berupa tradisi gotong royong dan musyawarah yang masih hidup di masyarakat turut mendorong partisipasi, meskipun memerlukan penguatan agar nilai-nilai tersebut tetap lestari dan relevan dalam konteks pembangunan saat ini.

Selanjutnya, faktor ekonomi berpengaruh besar terhadap keterlibatan masyarakat. Warga dengan keterbatasan ekonomi cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga kurang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan. Terakhir, faktor komunikasi menjadi aspek krusial yang kerap menjadi hambatan. Kurangnya informasi yang disampaikan pemerintah kelurahan menyebabkan masyarakat sering tidak mengetahui adanya proyek atau kegiatan pembangunan, yang pada akhirnya menghambat partisipasi mereka. Komunikasi yang efektif, terbuka, dan transparan sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor kesempatan, tetapi juga oleh kesadaran, informasi yang memadai, serta lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan komunikasi yang mendukung. Hasil ini sejalan dengan pandangan Watson yang menekankan bahwa partisipasi adalah hasil dari kombinasi antara dorongan internal dan pengaruh eksternal yang membentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya, Kota Gorontalo menunjukkan bahwa keterlibatan warga terjadi dalam berbagai tahapan pembangunan. Partisipasi ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Meski demikian, partisipasi tersebut belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi berbagai tantangan.

Pada tahap awal, partisipasi masyarakat dalam bentuk tanggapan terhadap informasi pembangunan menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu pembangunan lokal. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme sebagian warga dalam mengikuti penyuluhan atau sosialisasi program pembangunan yang dilakukan oleh pihak kelurahan atau pemerintah kota. Meski demikian, distribusi informasi belum merata dan

masih terdapat kendala dalam mekanisme komunikasi dua arah. Informasi sering kali bersifat satu arah dan belum menjangkau semua kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan warga dengan pendidikan rendah. Untuk meningkatkan kualitas partisipasi, diperlukan sistem informasi yang lebih transparan, terbuka, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, dalam Perencanaan, partisipasi masyarakat difasilitasi melalui forum-forum seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Forum ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan, dan kebutuhan mereka terkait pembangunan infrastruktur. Namun, dalam praktiknya, belum semua warga memiliki kesempatan atau kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif. Beberapa faktor yang menjadi hambatan adalah rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang proses pembangunan, serta keterbatasan waktu karena mayoritas warga bekerja dan memiliki kesibukan masing-masing. Akibatnya, hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat aktif, sementara sebagian lainnya cenderung pasif atau hanya mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, masyarakat menunjukkan partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga, material, maupun logistik. Nilai gotong royong masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Dembe Jaya. Kegiatan seperti perbaikan jalan, pembangunan saluran drainase, atau pembangunan fasilitas umum lainnya kerap melibatkan warga secara langsung. Namun, partisipasi ini belum merata. Sebagian warga hanya bersedia terlibat jika ada imbalan atau kompensasi, seperti uang makan atau bantuan langsung lainnya. Ini menunjukkan bahwa motivasi partisipasi sebagian masyarakat masih bersifat pragmatis dan belum sepenuhnya dilandasi oleh kesadaran kolektif untuk membangun lingkungan bersama.

Sementara itu, pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan, masyarakat secara umum merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Misalnya, pembangunan jalan lingkungan dan saluran air telah meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, serta kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Lebih lanjut, beberapa warga turut serta dalam upaya pemeliharaan dan perawatan hasil pembangunan, seperti menjaga kebersihan saluran air atau tidak merusak fasilitas umum. Namun, semangat menjaga hasil pembangunan belum sepenuhnya melekat pada seluruh masyarakat. Masih dibutuhkan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan infrastruktur pasca-pembangunan agar keberlanjutan program dapat terjaga.

Secara umum, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, antara lain:

1. Kesadaran masyarakat, yang berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap pentingnya pembangunan dan peran serta warga.
2. Faktor sosial, seperti hubungan antarwarga, solidaritas, dan kepercayaan terhadap pemerintah.
3. Faktor budaya, khususnya nilai gotong royong dan tradisi musyawarah yang masih hidup dalam masyarakat.
4. Faktor ekonomi, di mana kondisi ekonomi warga menentukan kemampuan mereka untuk menyumbangkan tenaga atau sumber daya.
5. Faktor komunikasi, yakni sejauh mana informasi pembangunan dapat diterima dan dipahami oleh warga.

Kelima faktor tersebut saling memengaruhi dan menentukan kualitas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi secara menyeluruh, diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, transparansi informasi, serta dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan yang partisipatif akan lebih berkelanjutan jika masyarakat merasa dilibatkan sejak awal hingga akhir proses, dan jika mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan tersebut.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi konstruktif bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat. Pertama, penting bagi pemerintah kelurahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan saluran umpan balik yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Saluran tersebut dapat berupa papan pengumuman kelurahan yang terletak di tempat strategis, media sosial resmi kelurahan, serta forum-forum lanjutan setelah kegiatan Musrenbang. Dengan adanya sarana komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap dan terkini, sekaligus dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan secara langsung.

Kedua, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan. Masih banyak warga yang belum memahami sepenuhnya peran dan manfaat partisipasi mereka, sehingga keterlibatan masyarakat cenderung formalitas belaka. Melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat tidak hanya hadir dalam kegiatan perencanaan, tetapi juga mampu berkontribusi secara kritis dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan

evaluasi hasil pembangunan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan warga, penyuluhan oleh tokoh masyarakat, atau kerja sama dengan perguruan tinggi lokal.

Ketiga, komunikasi dua arah antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat perlu diperkuat. Saat ini, hambatan komunikasi masih menjadi faktor yang membatasi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan media komunikasi yang lebih dekat dan familiar bagi warga, seperti grup WhatsApp RT/RW, papan informasi digital, serta kegiatan tatap muka secara berkala seperti forum warga atau dialog pembangunan. Komunikasi yang efektif akan membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembangunan.

Keempat, peneliti menyarankan agar pemerintah kelurahan mendorong budaya gotong royong secara terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun semangat gotong royong masih ada, namun pelaksanaannya belum merata dan masih bergantung pada insentif. Oleh karena itu, perlu strategi untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kontribusi sukarela, terutama dalam bentuk tenaga, waktu, dan sumber daya lokal untuk pelaksanaan serta pemeliharaan infrastruktur. Kegiatan gotong royong yang terencana dengan baik akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Kelima, dibutuhkan mekanisme evaluasi pembangunan yang bersifat partisipatif. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam proses evaluasi setelah pembangunan selesai dilakukan. Evaluasi ini tidak hanya untuk mengukur keberhasilan proyek, tetapi juga sebagai dasar perbaikan dan perencanaan pembangunan selanjutnya. Evaluasi yang melibatkan warga dapat dilakukan melalui forum warga, kuesioner, atau wawancara terbuka yang difasilitasi oleh pihak kelurahan. Terakhir, penting pula bagi pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi konflik sosial sejak tahap awal perencanaan. Isu-isu seperti penggunaan lahan, penempatan proyek, atau alokasi anggaran kerap memicu perbedaan pendapat di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan mediasi dan komunikasi terbuka harus menjadi bagian dari proses pembangunan. Pemerintah kelurahan harus mampu menjadi fasilitator yang netral, menyerap aspirasi semua pihak, serta menjembatani perbedaan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan ke depan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya dapat meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Keterlibatan yang aktif, inklusif, dan berkelanjutan akan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

REFERENSI

Adji, T. P. (2024). Desain Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, *27*, A27-dq.

Banteng, B. S. (2015). Analisis Keberhasilan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo. *Prosiding PESAT*, *6*.

Gwijangge, P., Kom, S., Darman, S. E., & Rizal, S. E. (2022). *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Infrastruktur*. CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.

Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, O. E. (2015). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di kabupaten lanny jaya-papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *15*(02).

Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 4445-4451.

Nurliana, N. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, *6*(1), 164-173.

Pemerintah Kelurahan Dembe Jaya. (2024). *Dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Dembe Jaya Tahun 2024.* Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo.

Sigalingging, A. H., & Warjio, W. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, *4*(2), 116-145.

Sinaga, A. Z. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam program kerja Bappeda Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(13), 36-43.

Slamet. (2003). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Grasindo.

Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumaluntung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, *6*(1), 161029.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wulandari, M., Mawardani, P., Rohman, Z., & Hayati, S. (2025). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi Kasus di Provinsi Lampung. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, *2*(2), 3752-3763.

Zubaidah, S., Hermansyah, H., Indah, V. F., Laili, R., Yuniarti, Y., & Saleh, H. M. (2024). Dampak Pemberdayaan Masyarakat terhadap Partisipasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 7*(1), 69-86.